

Daftar Pustaka

- Alhajjriana, G. I., Nor, W., & Wijaya, R. (2014). Faktor-faktor yang mempengaruhi Internet Financial Reporting Pemerintah daerah dan Implikasinya terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 15(1), 65–73.
- Alhajjriana, G. I., Nor, W., & Wijaya, R. (2017). Faktor-faktor yang mempengaruhi Internet Financial Reporting dan implikasinya terhadap akuntabilitas laporan keuangan daerah. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 17(2), 144–155.
- Arifin, J., & Rosita, L. R. A. (2017). Determinan Kualitas Pengungkapan Laporan Keuangan dalam Website Pemerintah Daerah, 1–26.
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (2017). <https://apjii.or.id/content/read/39/342/Hasil-Survei-Penetrasi-dan-Perilaku-Pengguna-Internet-Indonesia-2017>
- Dewi Darmastuti, & Setyaningrum, D. (2009). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Belanja Bantuan Sosial Pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Tahun 2009.
- Friskianti, Y. (Universitas N. S., & Handayani, B. D. (Universitas N. S. (2014). Accounting Analysis Journal. *Accounting Analysis Journal*, 3(1), 361–369.
- Ghozali, Imam, 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*, edisi 5. Semarang: Universitas Diponegoro
- Gilligan, T. W., & Matsusaka, J. G. (2001). Fiscal Policy, Legislature Size, and Political Parties: Evidence from State and Local Governments in the First Half of the 20th Century. *National Tax Journal*, 54(1), 57–82.
- Hadi, W. (2010). Pengaruh Likuiditas Dan Leverage Terhadap Kemandirian Daerah (Studi Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2007 Di

Wilayah Provinsi Aceh). *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi Vol. 3. No. 1. Januari 2010 Hal. 29-51*, 3(1).

Hilmi, A. Z., & Martani, D. (2012). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi. *Makalah Simposium Nasional Akuntansi XV*, 1–26.

Jaya, J. D., & Sisdyani, E. A. (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Pengungkapan Informasi Keuangan Daerah Melalui Situs Resmi Pemerintah Provinsi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 2, 285–303.

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.

Laswad, F., Fisher, R., & Oyelere, P. (2005). Determinants of voluntary Internet financial reporting by local government authorities. *Journal of Accounting and Public Policy*, 24(2), 101–121.

Mahmud, A., & Hudoyo, Y. T. (2014). Faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan laporan keuangan di internet oleh pemerintah daerah. *Accounting Analysis Journal*, 3(1), 361–369.

Nosihana, A., & Yaya, R. (2016). Internet Financial Reporting dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya Pada Pemerintah Kota dan Kabupaten Di Indonesia. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 3(2), 89–104.

Pratama, K. A. D., Werastuti, D. N. S., & Edy, S. (2015). Pengaruh Kompleksitas Pemerintah Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Kekayaan Daerah, dan Belanja Daerah Terhadap Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Bali Tahun 2010-2013). *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 3, No.1 Tahun 2015)*, 3(1).

- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Lembaran Negara Pemerintah Republik Indonesia. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2005. Undang undang No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Sekretariat Negara. Jakarta
- Republik Indonesia. 2005. Undang undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sekretariat Negara. Jakarta
- Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Lembaran Negara Republik Indonesia. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Lembaran Negara Pemerintah Republik Indonesia. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2005. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah*. Jakarta: Pemerintah Indonesia.
- Rossevelt, F. A., & Domai, T. (2014). Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pelaksanaan APBD Di Kota Malang (Studi di DPRD Kota Malang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 2 , No. 3, Hal . 400-406, 2(3), 400–406.
- Sari, I. P. (2016). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pad, Leverage, Dana Perimbangan Dan Ukuran Legislatif Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *JOM Fekon Vol.3 No.1 (Februari) 2016*, 679–692.
- Setyaningrum, D., & Syafitri, F. (2012). Analisis pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 9(2), 154–170.
- Styles, A. K., & Tennyson, M. (2007). The accessibility of financial reporting of U.S. Municipalities on the internet. *Journal of Public Budget, Accounting & Management*, 19(1), 56–92.

- Suhardjanto, D., & Yulianingtyas, R. R. (2011). Pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kepatuhan pengungkapan wajib dalam laporan keuangan pemerintah daerah (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Indonesia). *Jurnal Akuntansi & Auditing*, 8(1), 30–42.
- Verawaty. (2017). Determinan Transparansi Informasi Keuangan Daerah Melalui E-Government Pemerintah Daerah Sumatra Selatan. *Nucleic Acids Research*, 13(11), 92–107.
- Zebua, W. F. (2014). Pengaruh Alokasi Belanja Modal, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Terhadap Kualitas Pembangunan Manusia (Studi pada Kabupaten dan Kota di wilayah Provinsi Jawa Barat tahun 2011- 2013). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Brawijaya*, 3(1).